

## ***Bridging Research and Action: Assisting in the Preparation of Data-Based Poverty Alleviation Plans in Local Governments***

### **Menjembatani Riset dan Aksi: Pendampingan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data pada Pemerintah Daerah**

**\*Novayanti Sopia Rukmana S, Sulmiah, Sirajuddin Saleh, Anna Fiulaizi, Anisa Fitri**

Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

#### **ARTICLE INFO**

##### **Article History**

Received: October 03, 2025  
Revise: November 08, 2025  
Accepted: November 26, 2025

##### **Corresponding author:**

Email: [novayanti@unm.ac.id](mailto:novayanti@unm.ac.id)  
DOI: [doi.org/10.61220/sipakatau](https://doi.org/10.61220/sipakatau)  
Copyright © 2025 The Authors



This is an open access article  
under the [CC BY-SA](#) license

#### **ABSTRACT**

*Poverty is a multidimensional challenge that requires strategic and evidence-based planning. This community engagement initiative aims to strengthen the capacity of a local government institution in developing a data-driven poverty reduction plan through a collaborative and systematic policy-oriented approach. The program involved identifying strategic issues across multiple welfare dimensions, including education, health, consumption, employment, basic infrastructure, and food security. Participatory methods such as focus group discussions, technical workshops, and data validation sessions were applied to produce a comprehensive poverty profile at both macro and micro levels. The findings indicate that the local government faces complex poverty conditions with vulnerable populations concentrated in several areas and persistent gaps in key welfare indicators. The resulting plan outlines targeted interventions, program priorities, resource allocation, and measurable performance indicators for the medium-term planning period. This initiative demonstrates how policy-oriented academic engagement can enhance institutional capacity to formulate more effective, evidence-driven, and accountable poverty reduction strategies.*

**Keywords:** poverty, local government, data-driven planning, policy engagement, strategic intervention

#### **ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan isu multidimensional yang memerlukan perencanaan strategis berbasis bukti. Program pengabdian ini bertujuan memperkuat kapasitas sebuah pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan berbasis data melalui pendekatan kolaboratif dan analisis yang sistematis. Kegiatan melibatkan pemetaan isu strategis pada berbagai dimensi kesejahteraan, termasuk pendidikan, kesehatan, konsumsi, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan. Metode partisipatif seperti diskusi kelompok terarah, lokakarya teknis, dan sesi validasi data digunakan untuk menghasilkan profil kemiskinan komprehensif pada tingkat makro dan mikro. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan kemiskinan kompleks dengan konsentrasi kelompok rentan pada beberapa wilayah serta indikator kesejahteraan yang masih rendah. Dokumen rencana yang dihasilkan merumuskan intervensi terarah, prioritas program, alokasi sumber daya, serta indikator kinerja yang jelas untuk periode perencanaan jangka menengah. Program ini menunjukkan bahwa pendampingan berbasis kebijakan mampu memperkuat kapasitas institusi pemerintah dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** kemiskinan, pemerintah daerah, perencanaan berbasis data, pengabdian kebijakan, intervensi strategis

## 1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan tantangan pembangunan persisten yang ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum di berbagai dimensi termasuk pendapatan, konsumsi, dan akses terhadap layanan dasar seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan (Smith, 2011). Bank Dunia menekankan bahwa kemiskinan mencakup aspek sosial termasuk keterbatasan akses terhadap hak, keamanan, dan pengakuan sosial, melampaui ukuran ekonomi semata(Organization, 2005) ;(Bank, 2018). Memahami kemiskinan sebagai fenomena multidimensional memerlukan kerangka analitis komprehensif yang mengkaji penyebab struktural, faktor kontekstual, dan peluang intervensi di berbagai sektor(Gallup et al., 1999).

Di Indonesia, pengurangan kemiskinan tetap menjadi prioritas nasional yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kerangka regulasi ini menetapkan fondasi untuk upaya pengurangan kemiskinan terkoordinasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Pemerintah daerah diwajibkan mengembangkan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang menerjemahkan strategi nasional ke dalam intervensi spesifik konteks yang selaras dengan kondisi dan kapasitas lokal. Namun, banyak kabupaten menghadapi kendala teknis dan institusional dalam mengembangkan dokumen perencanaan berbasis bukti yang secara efektif mengatasi dinamika kemiskinan kompleks(Fields, 2011).

Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan menyajikan studi kasus menarik tentang tantangan kemiskinan persisten dalam konteks kaya sumber daya. Meskipun menjadi kabupaten terluas ketiga di Sulawesi Selatan dengan potensi signifikan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Bone melaporkan 73.000 penduduk miskin pada tahun 2024, menempati peringkat tertinggi kedua di provinsi setelah Kota Makassar. Paradoks kemiskinan di tengah potensi ini menyoroti pentingnya perencanaan strategis yang mengatasi tidak hanya dimensi ekonomi tetapi juga akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, peluang kerja, kecukupan infrastruktur, dan sistem ketahanan pangan. Kemiskinan di Bone termanifestasi melalui berbagai indikator termasuk capaian pendidikan rendah, tingkat putus sekolah tinggi, cakupan layanan kesehatan terbatas, pengangguran dan setengah pengangguran, kondisi perumahan tidak layak, dan kerentanan terhadap fluktuasi harga pangan.

Keterlibatan akademik dalam pengembangan kebijakan merepresentasikan kontribusi berharga yang dapat diberikan universitas untuk memperkuat kapasitas tata kelola lokal. Pengabdian masyarakat berorientasi kebijakan memperluas pembelajaran layanan tradisional dengan langsung mendukung institusi pemerintah dalam mengembangkan dokumen perencanaan strategis melalui bantuan teknis, analisis data, dan fasilitasi proses partisipatif (Stoecker, 2016). Pendekatan ini selaras dengan penekanan yang berkembang pada jalur penelitian-ke-kebijakan dan mobilisasi pengetahuan dalam studi pembangunan. Dengan menjembatani keahlian akademik dan kebutuhan tata kelola praktis, pengabdian berorientasi kebijakan meningkatkan baik kualitas dokumen kebijakan maupun kapasitas institusional lembaga pemerintah lokal untuk melakukan perencanaan berbasis bukti. Pengabdian masyarakat ini bertujuan mendukung Pemerintah Kabupaten Bone dalam mengembangkan RPKD 2025-2029 melalui keterlibatan sistematis dengan pemangku kepentingan, analisis data komprehensif, dan fasilitasi formulasi program strategis. Proyek menggunakan metodologi kolaboratif yang mengombinasikan analisis teknis dengan pendekatan partisipatif untuk memastikan baik ketelitian analitis maupun kepemilikan pemangku kepentingan terhadap dokumen yang dihasilkan.

## 2. METODE

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan berorientasi kebijakan yang ditandai dengan keterlibatan langsung dengan institusi pemerintah untuk mendukung pengembangan dokumen kebijakan berbasis bukti. Proyek diimplementasikan selama enam bulan dari Januari hingga Juni 2025 melalui kemitraan antara Laboratorium Center of Administration and Governance Studies Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone. Implementasi menggunakan metode campuran yang mengombinasikan analisis data kuantitatif dengan proses partisipatif kualitatif.

Dalam perencanaan dan implementasinya, program ini mengikuti prinsip-prinsip dasar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Khasanah et al. (2024), yang menekankan pentingnya proses identifikasi kebutuhan mitra, pemilihan metode edukasi yang tepat, serta pelaksanaan kegiatan berbasis partisipatif untuk meningkatkan kebermanfaatan program. Pendekatan ini memastikan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata melalui kolaborasi, asesmen kebutuhan, dan pendampingan berkelanjutan sesuai kerangka metodologi pengabdian masyarakat berbasis teori dan implementasi.

Aktivitas meliputi: (1) pertemuan koordinasi awal dengan pejabat pemerintah kabupaten untuk menetapkan lingkup proyek dan timeline; (2) pengumpulan dan analisis data sekunder komprehensif termasuk statistik

kemiskinan, indikator demografi, data ekonomi, dan metrik cakupan layanan dari sumber termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan berbagai dinas teknis; (3) lokakarya teknis dengan pejabat perencana untuk mengkaji kerangka analitis dan pemilihan indikator; (4) diskusi kelompok terfokus dengan perwakilan dari pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan kelompok rentan untuk memvalidasi temuan dan mengidentifikasi prioritas lokal; (5) sesi penyusunan di mana tim akademik menyiapkan bagian dokumen berdasarkan hasil analitis dan masukan pemangku kepentingan; dan (6) seminar validasi di mana draft dokumen dipresentasikan untuk peninjauan dan penyempurnaan.

Kerangka analitis yang digunakan mengkaji kemiskinan di enam dimensi strategis yang ditetapkan dalam pedoman penanggulangan kemiskinan nasional: pendidikan, kesehatan, pola konsumsi, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan. Untuk setiap dimensi, tim menganalisis tren tingkat makro menggunakan statistik agregat tingkat kabupaten dan pola tingkat mikro menggunakan data tingkat rumah tangga yang didisagregasi menurut kecamatan, jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Analisis spasial mengidentifikasi lokasi prioritas intervensi melalui pemetaan kuadran yang mengombinasikan indikator prevalensi dan keparahan kemiskinan. Komponen partisipatif memastikan bahwa perspektif masyarakat menginformasikan identifikasi masalah dan prioritisasi program sementara analisis teknis menyediakan fondasi empiris untuk keputusan strategis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil menghasilkan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah komprehensif untuk Kabupaten Bone yang mencakup periode 2025-2029. Dokumen menyediakan analisis sistematis kondisi kemiskinan, identifikasi isu strategis, penetapan area prioritas intervensi, dan formulasi program terarah dengan indikator kinerja dan alokasi sumber daya yang jelas. Bagian ini membahas temuan kunci dari analisis kemiskinan dan kerangka strategis yang dikembangkan melalui proses kolaboratif.

#### 3.1 Profil Kemiskinan dan Tantangan Multidimensional

Berdasarkan analisis yang dilakukan, Kabupaten Bone menghadapi tantangan kemiskinan substansial dengan 73.000 penduduk miskin pada tahun 2024, merupakan angka absolut tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Bone sangat mendalam dan memerlukan perhatian serius dari berbagai sektor. Analisis spasial mengidentifikasi konsentrasi signifikan populasi miskin di kecamatan Awangpone, Ulaweng, dan Dua Boccoe, sementara kecamatan Kahu, Telli Siattinge, dan Ulaweng mencatat jumlah tertinggi rumah tangga miskin. Konsentrasi spasial ini mengindikasikan bahwa kemiskinan di Bone menunjukkan baik besaran agregat maupun intensitas terlokalisir yang memerlukan strategi intervensi berbeda. Sifat multidimensional kemiskinan di Bone muncul jelas dari analisis indikator di sektor strategis. Dalam pendidikan, kabupaten menghadapi tantangan termasuk rata-rata lama sekolah rendah, tingkat buta huruf signifikan khususnya di area terpencil, akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas bagi keluarga miskin, dan jumlah substansial anak usia sekolah tidak bersekolah bersama kepala rumah tangga dengan capaian pendidikan minimal. Defisit pendidikan ini mengabdiakan transmisi kemiskinan antargenerasi sebagaimana didokumentasikan dalam teori modal manusia (Becker, 1994; Behrman et al., 2017). Tanpa pendidikan memadai, individu menghadapi peluang kerja terbatas dan kapasitas penghasilan berkurang, membatasi kemampuan mereka keluar dari kemiskinan.

Dimensi kesehatan mengungkapkan pola mengkhawatirkan termasuk umur harapan hidup rendah akibat akses tidak memadai terhadap layanan kesehatan berkualitas, populasi signifikan tanpa asuransi kesehatan khususnya di area pedesaan, dan risiko stunting anak tinggi mencerminkan defisiensi nutrisi. Tantangan kesehatan ini baik dihasilkan dari maupun berkontribusi terhadap kemiskinan melalui mekanisme yang diidentifikasi dalam kerangka kemiskinan-kesehatan (Wagstaff, 2002; Chung et al., 2020). Kesehatan buruk mengurangi kapasitas produktif dan menghasilkan pengeluaran kesehatan katastrofik yang mendorong rumah tangga rentan lebih dalam ke kemiskinan.

Pola konsumsi mengindikasikan daya beli lemah terutama di kalangan keluarga miskin, ketergantungan tinggi pada beras sebagai makanan pokok yang mempengaruhi keragaman diet dan resiliensi ketahanan pangan, dan akses terbatas terhadap makanan bergizi bagi rumah tangga miskin. Kerentanan konsumsi ini mencerminkan posisi ekonomi prekarius rumah tangga miskin yang kekurangan penyangga terhadap guncangan harga dan variasi pendapatan musiman. Analisis sektor ketenagakerjaan mengungkapkan tingkat pengangguran tinggi, jumlah signifikan individu usia kerja tidak terlibat dalam pekerjaan produktif, dan konsentrasi pekerjaan dalam aktivitas pertanian produktivitas rendah dengan imbal hasil minimal. Predominansi mata pencarian informal dan berorientasi subsisten membatasi kapasitas generasi pendapatan dan meninggalkan pekerja tanpa perlindungan sosial.

Defisit infrastruktur memperparah tantangan ini melalui kualitas dan cakupan tidak memadai layanan dasar termasuk air bersih, sanitasi, perumahan layak, dan listrik khususnya di area pedesaan dan terpencil. Infrastruktur buruk membatasi aktivitas ekonomi, membatasi akses terhadap pasar dan layanan, dan mengabdiakan ketimpangan spasial. Analisis ketahanan pangan menyoroti kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas dasar

termasuk beras, ayam, telur, minyak goreng, dan cabai, mengancam stabilitas konsumsi rumah tangga. Temuan multidimensional ini mendemonstrasikan bahwa kemiskinan di Bone tidak dapat diatasi melalui intervensi sektor tunggal tetapi memerlukan strategi terintegrasi yang mengatasi dimensi deprivasi saling terkait.



**Gambar 1.** Pengumpulan data untuk mendukung penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bone.

Gambar 1, menunjukkan salah satu proses pengumpulan dan analisis data sekunder yang dilakukan oleh tim pengabdian, yang melibatkan berbagai sumber data resmi seperti BPS, DTKS, dan dinas terkait. Data yang diperoleh digunakan untuk membangun gambaran lengkap mengenai kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Bone.

Setelah pengumpulan dan analisis data, serta sesi penyusunan dokumen berdasarkan hasil analisis dan masukan pemangku kepentingan, tahap berikutnya adalah seminar validasi. Pada seminar ini, draft dokumen RPKD dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan peninjauan dan penyempurnaan lebih lanjut. Umpaman yang diberikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas rencana penanggulangan kemiskinan yang disusun.

Hasil seminar menunjukkan bahwa masukan yang diberikan oleh para peserta validasi membantu memperbaiki berbagai aspek dalam dokumen RPKD, seperti penyempurnaan indikator dan penyesuaian prioritas intervensi.



**Gambar 2** seminar validasi hasil analisis data dan dokumen RPKD Kabupaten Bone.

Gambar 2 menunjukkan suasana seminar validasi yang diadakan untuk memperoleh umpan balik dari pemangku kepentingan terkait dengan hasil analisis data dan dokumen RPKD Kabupaten Bone. Hasil seminar validasi menunjukkan bahwa masukan yang diberikan oleh para peserta tidak hanya memperbaiki aspek teknis dalam dokumen RPKD, tetapi juga memberikan arahan yang lebih jelas mengenai prioritas program yang harus diutamakan dalam periode 2025-2029.

### 3.2. Isu Strategis dan Akar Penyebab

Proses analisis partisipatif mengidentifikasi akar penyebab yang mendasari pola kemiskinan teramati. Defisit pendidikan bersumber dari berbagai faktor termasuk infrastruktur sekolah tidak memadai khususnya di area terpencil, ketersediaan terbatas guru berkualifikasi di lokasi periferal, kendala ekonomi memaksa keluarga memprioritaskan tenaga kerja anak daripada sekolah, dan faktor kultural mempengaruhi aspirasi pendidikan khususnya bagi perempuan. Hambatan struktural ini memerlukan intervensi sistemik melampaui sekadar memperluas fasilitas sekolah.

Tantangan kesehatan mencerminkan kendala sisi pasokan termasuk distribusi tidak merata fasilitas dan personel kesehatan, hambatan keterjangkauan membatasi pemanfaatan terutama untuk perawatan preventif dan non-

darurat, dan kesenjangan pengetahuan mengenai perilaku kesehatan dan layanan tersedia. Prevalensi stunting tinggi mengindikasikan baik defisiensi nutrisi maupun akses tidak memadai layanan kesehatan ibu dan anak selama periode perkembangan kritis. Mengatasi kemiskinan kesehatan memerlukan baik memperluas ketersediaan layanan maupun mengurangi hambatan sisi permintaan melalui mekanisme pembiayaan dan pendidikan masyarakat.

Tantangan ketenagakerjaan terkait faktor ekonomi struktural termasuk diversifikasi terbatas melampaui pertanian primer, penciptaan lapangan kerja tidak memadai di sektor formal, ketidaksesuaian keterampilan antara kapasitas tenaga kerja dan peluang tersedia, dan sistem dukungan kewirausahaan lemah. Konsentrasi pekerjaan dalam pertanian subsisten mencerminkan baik alternatif terbatas maupun produktivitas pertanian rendah yang dihasilkan dari kepemilikan lahan kecil, modal terbatas, dan dukungan teknis tidak memadai (Deininger & Squire, 1998). Defisit infrastruktur pedesaan khususnya mempengaruhi komersialisasi pertanian dengan membatasi akses pasar dan meningkatkan biaya transaksi.

Kerentanan ketahanan pangan dihasilkan dari transmisi harga dari pasar nasional, diversifikasi produksi pangan lokal terbatas, dan resiliensi ekonomi rumah tangga lemah membuat keluarga rentan terhadap guncangan konsumsi. Ketergantungan tinggi pada beras yang dibeli daripada sumber pangan beragam meningkatkan kerentanan terhadap baik fluktuasi harga maupun gangguan pasokan. Tantangan saling terkait ini mendemonstrasikan bahwa kemiskinan di Bone bersumber dari faktor struktural termasuk pengembangan modal manusia tidak memadai, diversifikasi ekonomi lemah, penyediaan infrastruktur tidak mencukupi, dan sistem perlindungan sosial terbatas. Memahami akar penyebab ini menginformasikan kerangka program strategis yang dikembangkan melalui proses perencanaan.

### **3.3 Program Prioritas dan Kerangka Intervensi**

Berdasarkan analisis kemiskinan komprehensif dan konsultasi pemangku kepentingan, dokumen RPKD menetapkan kerangka strategis yang diorganisir di sekitar enam pilar intervensi sesuai dengan tantangan teridentifikasi: peningkatan pendidikan, penguatan layanan kesehatan, dukungan konsumsi dan ketahanan pangan, generasi lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial. Untuk setiap pilar, program spesifik dirumuskan dengan objektif jelas, penerima manfaat target, pendekatan implementasi, alokasi anggaran, dan indikator kinerja.

Program pendidikan mencakup penyediaan beasiswa bagi siswa miskin, pengembangan infrastruktur sekolah khususnya di area kurang terlayani, pelatihan dan penempatan guru ke lokasi terpencil, dan program literasi untuk pemuda dan orang dewasa putus sekolah. Intervensi ini bertujuan memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas, dan mengurangi tingkat putus sekolah di kalangan keluarga miskin. Program kesehatan berfokus pada memperluas cakupan asuransi melalui bantuan premi bagi rumah tangga miskin, memperkuat fasilitas kesehatan primer di area kurang terlayani, mengimplementasikan intervensi nutrisi terarah khususnya untuk ibu hamil dan anak, dan aktivitas promosi kesehatan. Upaya ini mengatasi baik ketersediaan layanan maupun hambatan keterjangkauan.

Program pemberdayaan ekonomi menekankan pelatihan keterampilan yang selaras dengan peluang ekonomi lokal, penyediaan modal produktif melalui kredit mikro dan dana bergulir, dukungan untuk intensifikasi dan diversifikasi pertanian, pengembangan kelompok tani dan koperasi, dan promosi pemrosesan nilai tambah untuk produk lokal. Intervensi ini menargetkan generasi lapangan kerja dan peningkatan pendapatan melalui baik jalur pekerjaan upahan maupun wirausaha. Program infrastruktur memprioritaskan pengembangan jalan pedesaan untuk meningkatkan konektivitas pasar, perluasan sistem air bersih, konstruksi fasilitas sanitasi, elektrifikasi area tidak terlayani, dan bantuan perumahan layak untuk keluarga miskin (Sen, 1999; Fadiha et al., 2025). Investasi infrastruktur dasar ini bertujuan meningkatkan kondisi hidup dan mendukung aktivitas ekonomi.

Program ketahanan pangan mencakup penyediaan beras bersubsidi untuk keluarga miskin, dukungan untuk kebutuhan rumah dan produksi pangan lokal, mekanisme stabilisasi harga pangan, dan pendidikan nutrisi. Program perlindungan sosial mengintegrasikan dan memperluas skema bantuan sosial eksisting termasuk transfer tunai bersyarat, transfer tunai tanpa syarat, dan bantuan natura sambil memperkuat mekanisme penargetan untuk memastikan manfaat mencapai populasi yang dituju. Kerangka program menekankan konvergensi lintas sektor dengan mengakui bahwa pengurangan kemiskinan berkelanjutan memerlukan intervensi terintegrasi yang mengatasi berbagai dimensi deprivasi secara simultan (Mosley & Verschoor, 2005; Komang & Sudemen, 2025).

### **3.4 Mekanisme Implementasi dan Keberlanjutan**

RPKD menetapkan mekanisme implementasi termasuk struktur koordinasi institusional, proses alokasi anggaran, sistem pemantauan, dan kerangka partisipasi masyarakat. Badan koordinasi yang terdiri dari perwakilan dinas terkait menyediakan pengawasan dan memastikan integrasi program. Rencana aksi tahunan menerjemahkan kerangka strategis lima tahun ke dalam aktivitas spesifik dengan anggaran terinci dan instansi bertanggung jawab. Pemantauan menggunakan baik indikator hasil yang melacak pengurangan kemiskinan maupun indikator keluaran yang mengukur kemajuan implementasi program (Sachs, 2005; Hidayat & Muhammad, 2024).

Mekanisme partisipasi masyarakat memastikan suara lokal menginformasikan implementasi dan adaptasi. Proses perencanaan tingkat desa mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas spesifik dalam kerangka kabupaten. Pemantauan masyarakat melalui mekanisme umpan balik memungkinkan penyesuaian responsif berdasarkan realitas lapangan. Pendekatan partisipatif ini meningkatkan baik relevansi program maupun keberlanjutan dengan membangun kepemilikan dan kapasitas lokal. Penekanan pada keterlibatan masyarakat mencerminkan prinsip pembangunan partisipatif yang mengakui pengetahuan dan agensi lokal sebagai sumber daya kritis untuk pengurangan kemiskinan efektif (Chambers, 1994; Wahib & Susanto, 2024).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berorientasi kebijakan ini mendemonstrasikan peran berharga yang dapat dimainkan institusi akademik dalam memperkuat kapasitas tata kelola lokal melalui dukungan teknis untuk perencanaan strategis. Pendekatan partisipatif yang digunakan memastikan bahwa dokumen RPKD mengombinasikan ketelitian analitis dengan kepemilikan pemangku kepentingan, meningkatkan baik kualitas teknisnya maupun legitimasi politik. Analisis kemiskinan komprehensif di berbagai dimensi menyediakan basis bukti untuk intervensi terarah yang mengatasi akar penyebab daripada gejala. Kerangka strategis yang ditetapkan menawarkan Pemerintah Kabupaten Bone arah jelas untuk upaya pengurangan kemiskinan dengan prioritas, program, dan mekanisme akuntabilitas eksplisit. Implementasi sukses akan memerlukan komitmen politik berkelanjutan, alokasi sumber daya memadai, koordinasi antarinstansi efektif, dan keterlibatan masyarakat berkelanjutan sepanjang periode 2025-2029.

#### REFERENSI

- Bank, W. (2018). *Poverty and shared prosperity 2018: Piecing together the poverty puzzle*. World Bank Publications.
- Becker, G. S. (1994). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.
- Behrman, J. R., Schott, W., Mani, S., Crookston, B. T., Dearden, K., Duc, L. T., ... & Stein, A. D. (2017). Intergenerational transmission of poverty and inequality: parental resources and schooling attainment and children's human capital in Ethiopia, India, Peru, and Vietnam. *Economic development and cultural change*, 65(4), 657-697.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Challenges, potentials and paradigm. *World Development*, 22(10), 1437–1454.
- Chung, G. K. K., Dong, D., Wong, S. Y. S., Wong, H., & Chung, R. Y. N. (2020). Perceived poverty and health, and their roles in the poverty-health vicious cycle: a qualitative study of major stakeholders in the healthcare setting in Hong Kong. *International journal for equity in health*, 19(1), 13.
- Deininger, K., & Squire, L. (1998). New ways of looking at old issues: Inequality and growth. *Journal of Development Economics*, 57(2), 259–287.
- Fadiha, F. A., Amanah, M. R. R., Aprillia, W., & Shafrani, Y. S. (2025). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi dan Kualitas Hidup di Perkotaan: Studi Kasus Kabupaten Banyumas. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6).
- Fields, G. S. (2011). Labor market analysis for developing countries. *Labour Economics*, 18(Supplement 1), S16–S22.
- Gallup, J. L., Sachs, J. D., & Mellinger, A. D. (1999). Geography and economic development. *International Regional Science Review*, 22(2), 179–232.
- Hidayat, S., & Muhammad, A. S. (2024). Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bantul. *TheJournalish: Social and Government*, 5(2), 183-189.
- Khasanah, U., Trisnawati, S. N. I., Isma, A., Alanur, S. N., Maida, A. N., Nainiti, N. P. P. E., Amin, L. H., Aryawati, N. P. A., Murwati, M., Bangu, B., & Maulida, C. (2024). Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat: Teori dan Implementasi. Penerbit Tahta Media.
- Komang, E. M., & Sudemen, I. W. (2025). Pola Intervensi Pemerintah melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 9(1), 68-77.
- Mosley, P., & Verschoor, A. (2005). Risk attitudes and the “vicious circle of poverty.” *The European Journal of Development Research*, 17(1), 59–88.
- Organization, W. H. (2005). *World health report 2005: Make every mother and child count*. WHO Press.
- Sachs, J. D. (2005). *The end of poverty: Economic possibilities for our time*. Penguin Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Addison-Wesley.
- Stoecker, R. (2016). *Liberating service learning and the rest of higher education civic engagement*. Temple University Press.

- Wagstaff, A. (2002). Poverty and health sector inequalities. *Bulletin of the World Health Organization*, 80(2), 97–105.
- Wahib, M., & Susanto, A. (2024). Pendidikan Berbasis Komunitas: Membangun Ekonomi Kerakyatan Melalui Keterlibatan Masyarakat. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 2(6), 330-341.